

ABSTRAK

Iswatun Hasanah, 0910842030, Pengembangan Kapasitas Organisasi (*Capacity Building*) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2016. Dibimbing oleh: Dr. Ria Ariany, SS, M.Si. dan Rozidateno P. Hanida, S.IP, M.PA

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan peningkatan prasarana, fasilitasi bimbingan dan pengawasan teknis, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api. Berdasarkan peraturan tersebut maka Balai Teknik Perkeretaapian dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2014 tersebut mengenai perubahan organisasi Balai Teknik Perkeretaapian yang sebelumnya merupakan Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Perkeretaapian menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Peneliti mendeskripsikan pengembangan kapasitas internal organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat dengan menggunakan teori pendekatan dalam pengembangan internal organisasi oleh Eade yaitu : struktur, sumber daya fisik, sistem kerja, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, budaya, dan kepemimpinan. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas internal organisasi Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari terlaksananya pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kapasitas internal organisasi pada balai tersebut. Hanya saja perlu terus dilakukan beberapa perubahan kearah perbaikan berupa peningkatan jumlah sumber daya manusia, serta perumusan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai wujud dari peningkatan sistem kerja organisasi.

Kata kunci : Peraturan Menteri Perhubungan, Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Balai Teknik Perkeretaapian